



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025



Disusun Oleh :

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesainya Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Batam yang merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk menerangkan tingkat pencapaian sasaran atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 merupakan perkembangan capaian kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pangkalan PSDKP Batam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan serta melakukan perbaikan sistem dan strategi melalui koordinasi secara terus menerus dengan berbagai pihak untuk perbaikan kinerja selanjutnya.

Dengan adanya Laporan Kinerja triwulan I Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan permasalahan di Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dalam melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta diharapkan dapat membuka pemikiran lebih kreatif dari berbagai pihak tentang bagaimana meningkatkan peran dan kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Batam.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggaraan Negara tentu saja Laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

Batam, 17 April 2025
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Batam,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Semuel Sandi Rundupadang

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Batam merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari rencana pada Triwulan I tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja sesuai dengan Renstra 2025-2029. Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggung jawaban Kepala Pangkalan PSDKP Batam kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program atau kegiatan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Disamping itu juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran.

Seluruh target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) dari masing-masing sasaran strategis Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini karena sebagian besar kegiatan yang akan dilakukan telah disusun dan direncanakan pada awal tahun, sehingga pelaksanaan kegiatan pada periode berjalan sudah mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan. Selain itu adanya koordinasi dengan berbagai instansi dan serta pendampingan dari tim Direktorat serta sekretariat Ditjen. PSDKP turut mendukung tercapainya target kinerja Pangkalan PSDKP Batam.

Pada semester I tahun 2025 terdapat kendala yaitu adanya efisiensi anggaran berdasarkan inpres nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi bahwa ada beberapa sasaran kinerja belum dapat dilaksanakan pada triwulan I khususnya terkait dengan operasi armada kapal pengawas dan pembinaan pokmaswas.

Pada triwulan I tahun 2025 ini capaian kinerja Pangkalan PSDKP Batam sebesar 106,23 dengan penilaian BAIK. Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam TA. 2025 sebesar Rp. 39.350.325.000 namun setelah efisiensi beberapa anggaran diblokir menjadi 21.973.228.000. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua program, yaitu program pengelolaan kelautan dan perikanan serta program dukungan manajemen dengan total realisasi anggaran semester I tahun 2025 sebesar Rp. **4.905.995.628,-** atau **12,47%**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP	2
1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Batam.....	3
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis 2024-2029 Pangkalan PSDKP Batam.....	12
2.2 Visi, Misi dan Tujuan Pangkalan PSDKP Batam	12
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Batam	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam.....	18
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	20
3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	42
BAB IV PENUTUP	43
5.1 Kesimpulan	43
5.2 Rekomendasi	43
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2025.....	15
2. Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan SDKP Batam Triwulan I Tahun 2025.....	18
3. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Batam Triwulan I Tahun 2025.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Batam	6
2. Wilayah Administrasi Pangkalan PSDKP Batam.....	11

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam (Pangkalan PSDKP Batam) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar akan dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2025-2029.

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Pangkalan PSDKP Batam telah melakukan Pengukuran kinerja secara berkala dan melaporkannya secara rutin kepada Direktur Jenderal PSDKP.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan Kinerja yaitu untuk melaporkan capaian program/kegiatan pada tahun 2025 Triwulan I dan sebagai bahan evaluasi atas program/kegiatan yang telah direncanakan apakah sudah sesuai dengan pencapaian yang diharapkan atau masih di bawah dari target kinerja yang sudah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan laporan kinerja ini yaitu sebagai laporan capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Batam Triwulan I Tahun 2025.

1.3 Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengawasan Pangkalan PSDKP Batam yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain:

1. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
 - a. Masih adanya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 711 yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA);
 - b. Masih adanya Kapal Ikan Indonesia (KII) yang melakukan operasi penangkapan pada wilayah yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha;
 - c. Adanya kegiatan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) ke luar negeri melalui Palembang dan jambi kemudian diseberangkan ke singapura melalui laut sekitar Batam;
 - d. Adanya ikan hasil importasi yang masih belum sesuai dengan peruntukannya;
 - e. Kegiatan usaha perikanan belum mempunyai perizinan berusaha.
2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

- a. Adanya kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha;
- b. Adanya pemanfaatan ruang laut yang belum berizin;
- c. Masih terdapat pelaku usaha yg tidak taat peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan ikan dilindungi;
- d. Adanya pemanfaatan pulau2 kecil yang tidak memiliki perizinan;
- e. Masih adanya pelaku usaha subsektor Kelautan yg belum taat dalam perizinan.

1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Batam

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 69/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pangkalan Pengawasan SDKP Batam menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

1. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas

- perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
 7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

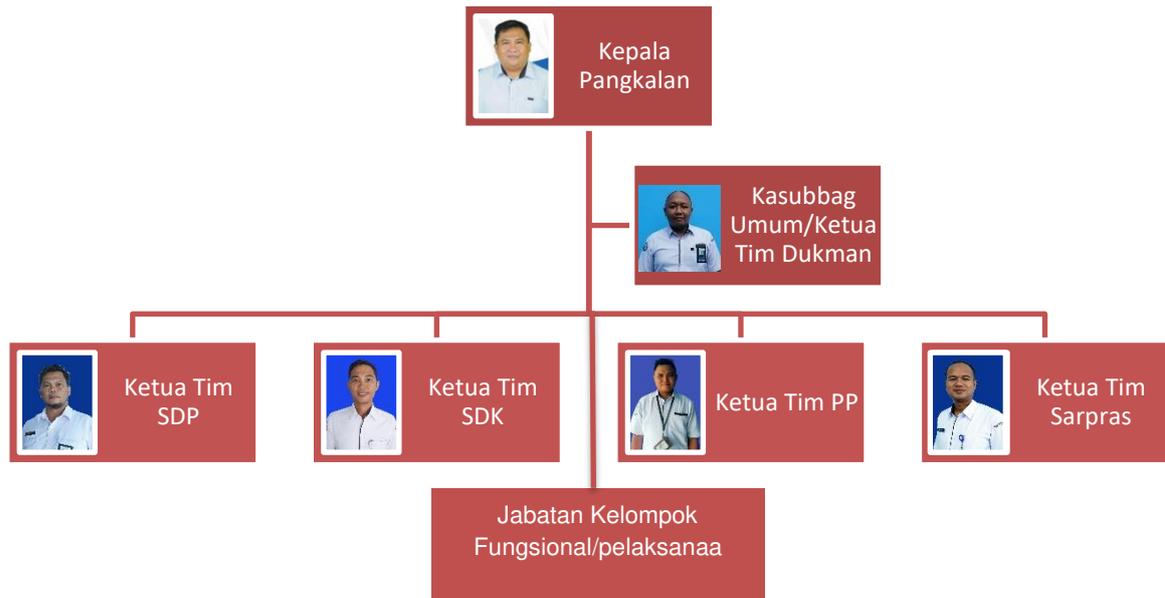
Kemudian terhadap pelaksanaan tugas pokok tersebut, terdapat beberapa sasaran kegiatan di Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2025, antara lain:

1. Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif;
2. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif yaitu:
 - a. Operasi Kapal Pengawas HIU 03 dan HIU 017;
 - b. Operasional 13 *Speedboat/Rigid Inflate Boad/Rubbe Boat/Unit Reaksi Cepat*;
3. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan;
4. Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif
5. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan yaitu:
 - a. Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya
 - b. Pengawasan Pencegahan Pencemaran/pengelolaan limbah.
6. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan yaitu Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya:

Tindak lanjut hasil pengawasan yang terindikasi melakukan TPKP;
7. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan, yaitu:
 - a. terselesaikannya pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan;

- b. terselesaikannya pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.
8. terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan;
9. tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pangkalan PSDKP Batam di pimpin oleh Kepala Pangkalan yang merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator. Kepala Pangkalan membawahi Kepala Subbagian Umum yang merangkap sebagai Ketua Tim Dukungan Manajemen, Ketua Tim Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Ketua Tim Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ketua Tim Penanganan Pelanggaran, Ketua Tim Prasarana, Sarana dan Operasional Kapal Pengawas serta Kelompok Jabatan Fungsional dengan total sumber daya manusia yang ada sejumlah 164 pegawai yang terdiri dari 82 PNS, 21 PPPK, 22 PPNPN dan 39 PJLP sebagaimana gambar 1 berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Batam

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Tim Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam diuraikan sebagai berikut:

1. Tim Kerja Dukungan Manajemen

Tugas :

Melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga serta pengelolaan BMN dan perlengkapan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data, dan pengolahan kinerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta penyusunan bahan pimpinan;

- b. Penyiapan perencanaan, pengembangan, disiplin, kesejahteraan, mutasi, tata usaha sumber daya manusia aparatur serta pengelolaan jabatan fungsional tertentu;
- c. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, tindak lanjut laporan hasil audit, manajemen risiko, dan penyusunan laporan keuangan, penatausahaan, pemanfaatan, penggunaan, penghapusan dan pelaporan barang miliknegara, serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta urusan tata usaha, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

2. Tim Kerja Sarana, Prasarana dan Operasi Kapal Pengawas

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu

pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan; dan

- c. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasn, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan.

3. Tim Kerja Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan Sumber Daya Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya perikanan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya perikanan; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sumber daya perikanan.

4. Tim Kerja Intelejen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya kelautan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya kelautan; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sumber daya kelautan.

5. Tim Kerja Penanganan Pelanggaran

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Penanganan Pelanggaran, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang penyelenggaraan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.

Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dalam melaksanakan tugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di wilayah Propinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Jambi membawahi 7 (tujuh) Satuan Pengawasan (Satwas) yaitu Satwas SDKP Tanjung Pinang, Satwas SDKP Natuna, Satwas SDKP Anambas, Satwas SDKP Bangka, Satwas SDKP Belitung, Satwas SDKP Palembang, dan Satwas SDKP Tanjung Jabung Barat. Wilayah administratif Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Wilayah Adminstratif Pangkalan PSDKP Batam

1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Triwulan I tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

a) **Bab I Pendahuluan**

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, isu aktual pengawasan SDKP, serta tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Batam.

b) **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja triwulan I tahun 2025.

c) **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**

Menguraikan hasil pengukuran kinerja dan keuangan, evaluasi dan analisis capaian kinerja dan keuangan Pangkalan PSDKP Batam triwulan I Tahun 2025.

d) **Bab IV Penutup**

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasi perbaikan kinerja ke depan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2025-2029 Ditjen. PSDKP

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Namun demikian, renstra Ditjen PSDKP tahun 2025-2029 masih dalam tahap perumusan sehingga sampai penyusunan laporan Triwulan I masih menggunakan Renstra tahun 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

2.2 Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi Ditjen PSDKP adalah:

“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Dengan misi:

- 1 Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi
- 2 Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan
- 3 Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggungjawab;
- 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP

2. Tujuan Dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2025. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2020-2025 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 sebagaimana berikut:

1. Terselenggaranya pembinaan pokmaswas secara efektif
2. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP
3. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan
4. Terselenggaranya intelejen kelautan dan perikanan secara efektif
5. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan
6. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan
7. Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan
8. Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan
9. Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Batam

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan iktikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam periode waktu satu tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; ⁽³⁾ Sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽⁴⁾ Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya. Anggaran Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 sebesar Rp. 39.350.325.000,-. Untuk Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2025 pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	82
2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	2	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		3	Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92
3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	4	Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		5	Persentase prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		6	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100
4	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	7	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
		8	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75
5	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	9	Indeks kinerja pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
6	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	10	Indeks kinerja pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81
		12	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	13	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94
9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	71,5
		15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	92
		16	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Indeks)	81
		17	Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	86
		18	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	100
		19	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95
		20	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	88,5
		21	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		22	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	80
		23	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Inovasi)	1
		24	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70

Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IKM) dilakukan dengan berpedoman pada formulasi penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual Indikator Kinerja Utama/Informasi Indikator Kinerja. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian yang telah diraih dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan Laporan Kinerja yang didukung Aplikasi “**Kinerjaku**” yang merupakan aplikasi khusus berbasis informasi teknologi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan pengelolaan kinerja triwulan I tahun 2025, Capaian Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Batam meliputi 5 Sasaran Kegiatan dengan 05 IKU dan 3 IKM. Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam triwulan I tahun 2025 ditabulasikan dibawah ini.

Tabel 2. Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam triwulan I tahun 2025

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Skala	Palanasi	Pertanggung	Target 2025	Target Maret	Capaian Maret	%	Target scd Maret
5.01	Terselenggaranya Pembinaan Pemasaww Secara Efektif								
1	Indeks Kualitas Pembinaan Pemasaww	Indeks	Maximize	Nilai Positif Akhir	82,00	0,00			0,00
5.02	Terselenggaranya operasi armada pengawasn SDKP secara efektif								
2	Indeks operasi kapal pengawasn	Indeks	Maximize	Nilai Positif Akhir	82,00	0,00			0,00
3	Indeks operasi pesawat pengawasn	Indeks	Maximize	Nilai Positif Akhir	82,00	0,00			0,00
5.03	Terselenggaranya Pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasn SDKP yang sesuai ketentuan								
4	Persentase sarana pengawasn SDKP yang di selesaikan	Persen	Maximize	Nilai Positif Akhir	100,00	0,00			0,00
5	Persentase prasarana Pengawasn SDKP yang di selesaikan	Persen	Maximize	Nilai Positif Akhir	100,00	0,00			0,00
6	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasn SDKP	Persen	Maximize	Nilai Positif Akhir	100,00	0,00			0,00
5.04	Terselenggaranya Intelektual kelautan dan perikanan secara efektif								
7	Tingkat akurasi dan validitas hasil inteljen kelautan	Nilai	Maximize	Nilai Positif Akhir	75,00	0,00			0,00
8	Tingkat akurasi dan validitas hasil inteljen perikanan	Nilai	Maximize	Nilai Positif Akhir	75,00	0,00			0,00
5.05	Terselenggaranya pengawasn sumber daya kelautan								
9	Indeks jemberkasan perahu usaha kelautan	Indeks	Maximize	Nilai Positif Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Indeks jemberkasan perahu usaha perikanan	Indeks	Maximize	Nilai Positif Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

5.67 Terselenggaranya penanganen pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan				120,00	120,00							
11	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Data Dukung1	Indeks	Maximize	Nilai Positif Akhir	81,00	65,00	81,00	120,00	60,00	81,00	120,00	15-Apr-2025 11:10
Tambah Data Dukung1												
12	Indeks pemertaaan hasil analisis pemertaaan sumber daya kelautan dan perikanan Data Dukung1	Indeks	Maximize	Nilai Positif Akhir	81,00	65,00	81,00	120,00	60,00	81,00	120,00	15-Apr-2025 11:10
Tambah Data Dukung1												
5.68 Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan												
13	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan Data Dukung1	Indeks	Maximize	Nilai Positif Akhir	94,00	90,00	100,00	111,11	90,00	100,00	111,11	15-Apr-2025 11:10
Tambah Data Dukung1												
5.69 Tata kelola pemerintahan yang efektif, lircah dan akurat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan												
14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sektar Inklusif Pngkatan PSDKP Batam Tambah Data Dukung1	Nilai	Maximize	Nilai Positif Akhir	71,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 11:10
15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sektar Inklusif Pngkatan PSDKP Batam Tambah Data Dukung1	Nilai	Maximize	Nilai Positif Akhir	92,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 11:10
16	Indeks Profesionalitas ASN Pngkatan PSDKP Batam Tambah Data Dukung1	Indeks	Maximize	Nilai Positif Akhir	81,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 11:10
17	Pemilaian Mandiri SAKIP Sektar Pngkatan PSDKP Batam (Nilai) Tambah Data Dukung1	Nilai	Maximize	Nilai Positif Akhir	86,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 11:10
18	Pemertaaan Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pngkatan PSDKP Batam Data Dukung1	Persen	Maximize	Nilai Positif Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	15-Apr-2025 11:10
Tambah Data Dukung1												
19	Pemertaaan jumlah elemen/hasil pengawasan Unit Kerja Inklusif Pngkatan PSDKP Batam yang ditukun tidak lanjutnya telah ditanggapi dan diampalkan Data Dukung1	Persen	Maximize	Nilai Positif Akhir	96,00	90,00	100,00	105,26	90,00	100,00	105,26	15-Apr-2025 11:10
Tambah Data Dukung1												
20	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja Inklusif Pngkatan PSDKP Batam Data Dukung1	Nilai	Maximize	Nilai Positif Akhir	88,50	88,50	83,01	84,81	88,50	83,01	84,81	15-Apr-2025 11:10
Tambah Data Dukung1												
21	Nilai Minimal yang Dipersementakan untuk Unit Kerja Berprestasi Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja Inklusif Pngkatan PSDKP Batam Tambah Data Dukung1	Nilai	Maximize	Nilai Positif Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 11:10
Tambah Data Dukung1												
22	Nilai Pengawasan Keangpan Internal Pngkatan PSDKP Batam Tambah Data Dukung1	Nilai	Maximize	Nilai Positif Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 11:10
Tambah Data Dukung1												
23	Insiasi pelayanan publik yang ditanggapi Pngkatan PSDKP Batam (Insiasi) Tambah Data Dukung1	Insiasi	Maximize	Nilai Positif Akhir	1,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 11:10
Tambah Data Dukung1												
24	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Tambah Data Dukung1	Nilai	Maximize	Nilai Positif Akhir	70,00	0,00			0,00	0,00		15-Apr-2025 11:10
Tambah Data Dukung1												

Analisa dan monitoring yang digunakan pada pencapaian kinerja triwulan I tahun 2025 adalah membandingkan capaian kinerja tahun 2025 dengan target yang di tetapkan dalam Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2025.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan sebagian kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

Sasaran Kegiatan 1 (***Terselenggaranya pembinaan pokmaswas secara efektif***), kegiatan 2 (***Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif***), kegiatan 3 (***Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan***) belum dilakukan sehingga kinerja didalam e kinerjaku masih kosong atau belum terealisasi. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran atau pemblokiran anggaran sehingga untuk pembinaan pokmaswas dan patroli kapal pengawas maupun speedboat belum dilaksanakan. Namun anggaran yang sudah direalisasikan sejumlah 172.825.200 untuk keperluan awak kapal seperti natura, jaga sandar, dan daya tahan tubuh.

*Evaluasi dan analisis pada IKU1 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 1 (Terselenggaranya pembinaan pokmaswas secara efektif)** yaitu:*

1) Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Triwulan I 2025		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	82	0	0	0

Target Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas sebesar 82 dan ditetapkan sebagai target Tahunan, namun pada triwulan I tahun 2025 belum ditargetkan karena adanya efisiensi anggaran berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang mana anggaran pembinaan pokmaswas sampai dengan Triwulan I menjadi Rp. 0,-. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS merupakan sebuah

ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif. Alokasi anggaran untuk pembinaan POKMASWAS pada tahun 2025 sebesar Rp. 200.000.000,-. Pada tahun 2024, kegiatan pembinaan pokmaswas terlaksana 100% yang dilaksanakan di 2 (dua) lokasi yaitu di Jambi dan Palembang.

Evaluasi dan analisis pada IKU2 dan IKU3 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 2 (Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif)** yaitu:

2) Indeks operasi kapal pengawas

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Triwulan I 2025		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU2	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92	-	-	-

Target indeks Kinerja Operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2025 adalah 92 namun pada triwulan I tahun 2025 belum ditargetkan karena adanya efisiensi anggaran berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang mana anggaran Operasi Kapal Pengawas sampai dengan Triwulan I pagu efektif menjadi Rp 2.195.854.000, dengan ketersediaan anggaran BBM Rp. 560.000.000 yang digunakan untuk stasioner 2 (dua) kapal selama 1 tahun. Pagu anggaran untuk operasi kapal pengawas tahun 2025 Rp. 11.245.267.000 namun terserap hanya Rp. 136.240.400,- atau 1,21% untuk kebutuhan natura, jaga sandar, dan daya tahan tubuh.

3) Indeks operasi speedboat pengawas

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Triwulan I 2025		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU3	Indeks operasi speedboat pengawas	92	-	-	-

Target indeks Kinerja Operasi speedboat pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2025 adalah 92 namun pada triwulan I tahun 2025 belum ditargetkan karena adanya efisiensi anggaran berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang mana anggaran Operasi speedboat Pengawas sampai dengan Triwulan I sebesar Rp 432,175,000. rata2 per speedboat 10 hari, di gunakan secara prioritas bila ada urgen seperti aduan masyarakat dan pengawasan yang harus di Tindak lanjuti segera. Pagu anggaran Operasi speedboat pengawas tahun 2025 sebesar Rp. 915.354.000,- namun anggaran yang digunakan sebesar Rp. 4.675.000,- atau 0,51%.

Evaluasi dan analisis pada IKU4, IKU5, dan IKU6 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 3 (Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan)** yaitu:

4) Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Triwulan I 2025		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU4	Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan	100	-	-	-

Pada triwulan I Tahun 2025 belum ada pelaksanaan karena adanya efisiensi anggaran sehingga kapal pengawas tidak melakukan patroli. Pagu anggaran untuk operasi kapal pengawas tahun 2025 Rp. 11.245.267.000 namun terserap hanya Rp.

136.240.400,- atau 1,21% untuk kebutuhan natura, jaga sandar, dan daya tahan tubuh.

5) Persentase prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Triwulan I 2025		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU5	Persentase prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan	100	-	-	-

Persentase prasarana Pengawasan SDKP Pangkalan PSDKP Batam mendapat target sebesar 100% dan menjadi target tahunan. Rencana pengadaan prasarana pengawasan SDKP tahun 2025 adalah *dronegeomapping* 2 unit dan GPS handheld 1 unit dengan anggaran Rp. 140.000.000,- direncanakan dilakukan pada Triwulan III sehingga di Triwulan I Tahun 2025 masih belum ada realisasi.

6) Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Triwulan I 2025		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU6	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	100	0	0	0

Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam mendapat target sebesar 100% dan menjadi target tahunan. Pada triwulan I belum tercapai karena sifatnya akumulatif sampai tahun 2025. Jumlah armada yang dirawat 15 unit yang terdiri dari 2 unit kapal pengawas dan 13 unit speedboat. Jumlah anggaran perawatan Rp. 1.967.900,000,- dan hanya

teralisasi Rp. 31.909.800,- untuk belanja barang kebutuhan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas.

Evaluasi dan analisis pada IKU7 dan IKU8 diuraikan sebagai Sasaran Kegiatan 4 (Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif) yaitu:

7) Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Triwulan I 2025		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU7	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan	75	0	0	0

Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 mendapat target sebesar 75% dan menjadi target tahunan. Rencana kegiatan intelijen kelautan 2025 triwulan IV sehingga pada triwulan I belum terlaksana. Pagu anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp. 124.747.000,- dan belum ada realisasi. Indikator kinerja tingkat akurasi dan validasi hasil intelijen kelautan baru ada tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan karena tersedia inteligen yang akurat.

8) Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Triwulan I 2025		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU8	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan	75	0	0	0

Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 mendapat target sebesar 75% dan menjadi target tahunan. Rencana kegiatan intelijen perikanan 2025 triwulan IV sehingga pada triwulan I belum terlaksana. Pagu anggaran untuk intelijen perikanan pada tahun 2025 sebesar Rp.

61.790.000,- dan belum ada realisasi. Indikator kinerja tingkat akurasi dan validasi hasil intelijen perikanan baru ada tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan karena tersedia inteligen yang akurat.

*Evaluasi dan analisis pada IKU9 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 5 (Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan)** yaitu:*

9) Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Triwulan I 2025		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU9	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan	100	100	100	100,00

Pengawasan dilakukan terhadap 6 Pelaku usaha Pemanfaatan ruang laut, Pelaku usaha perizinan berusaha sektor kelautan Reklamasi 1 pelaku usaha, ikan dilindungi 2 pelaku usaha, Pencemaran 1 pelaku usaha.

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan tahun 2025 terbentuk dari beberapa komponen, antara lain:

a) Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPRL)

Pengawasan pemanfaatan Pelaku usaha yang patuh adalah perorangan/badan yang melakukan usaha dengan memanfaatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan memiliki dokumen PKKPRL dan kesesuaian terhadap kegiatan pemanfaatannya.

b) Pelaku usaha perizinan berusaha sektor kelautan (Reklamasi)

Pelaku usaha yang patuh adalah perorangan/badan yang melakukan usaha dengan memanfaatkan wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil. Pengawasan

pemanfaatan wilayah pesisir fokus pada aktivitas reklamasi dengan kepemilikan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

c) Pelaku usaha perizinan berusaha sektor kelautan *Pengawasan ikan dilindungi*

Pelaku usaha adalah perorangan/badan yang melakukan usaha di bidang sektor kelautan pemanfaatan ikan yang dilindungi. Patuh dalam pemanfaatan dan pendistribusian ikan yang dilindungi, pengawasan ini dilaksanakan dalam memeriksa kesesuaian kuota yang diberikan dalam perizinan SAJI dan SIPJI terhadap pelaku usaha.

d) Pelaku usaha perizinan berusaha sektor kelautan *Pengawasan Pencemaran*

Pelaku usaha adalah perorangan/badan yang melakukan usaha di bidang sektor kelautan, perikanan, dan usaha lainnya. Patuh dalam pencegahan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pengawasan dilaksanakan pada pelaku usaha sektor pengolahan ikan terhadap pengelolaan pencemaran yang ditimbulkan terhadap kegiatan usaha.

Alokasi anggaran untuk pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan pada tahun 2025 sebesar Rp. 830.000.000,- dan setelah ada revisi tersedia pada Triwulan I sebesar Rp. 141.120.000,- serta terealisasi sebesar Rp. 11.060.900,- atau 1,33% dari pagu awal. Dengan adanya efisiensi pada tahun ini menjadi hambatan tersendiri terkait realisasi kegiatan. Capaian pengawasan sumber daya perikanan sangat baik mengingat indeks tercapai 100 dengan keterbatasan anggaran.

Evaluasi dan analisis pada IKU10 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 6** (*Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan*) yaitu:

10) Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Triwulan I 2025		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU10	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100	100	100	100,00

Capaian indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan pada triwulan I tahun 2025 adalah 100. Hal ini dikarenakan kapabilitas pengawas perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam meningkat melalui bimtek atau pelatihan serta adanya kemudahan pengawasan melalui modul wasrisk yang mencakup keseluruhan komponen untuk capaian IKU, mulai dari persiapan, pelaksanaan kegiatan pengawasan, dan pelaporan. Meskipun pada tahun 2025 belum terdapat bimtek ataupun pelatihan di masing-masing bidang, namun pada triwulan IV tahun 2025 telah dilaksanakan *in-house training* di lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam untuk kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko di masing-masing bidang dengan menggunakan modul wasrisk yang disediakan oleh Direktorat PSDP.

Penggunaan modul wasrisk telah meningkatkan akuntabilitas pengawasan, karena sebelum kegiatan pengawasan dilaksanakan, terlebih dahulu harus terpenuhi seluruh kelengkapan persiapan pengawasan. Setelah seluruh kelengkapan persiapan pengawasan terpenuhi, kegiatan pengawasan baru dapat dilaksanakan pada hari sesuai dengan penjadwalan. Pelaporan kemudian secara otomatis disampaikan melalui sistem wasrisk kepada Direktur PSDP. Keseluruhan tahapan ini telah membantu Pengawas Perikanan untuk tertib dalam memenuhi seluruh kelengkapan yang diperlukan, serta mempermudah pengarsipan dan pelaporan hasil kegiatan pengawasan.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan pada Triwulan I tahun 2025 bersifat pengawasan rutin, yang dilaksanakan terhadap 3 pelaku usaha perizinan berusaha berbasis resiko, yang terdiri dari 2 pelaku usaha Pengolahan Hasil Perikanan dan 1 pelaku usaha Pembudidayaan Ikan. Pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis resiko dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan dengan memperhatikan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

Pada tahun 2025, pagu anggaran pengawasan sumber daya perikanan sebesar tahun 2025 sebesar Rp. 1,019,000,000,- dan setelah efisiensi menjadi Rp. 109.735.000,- dan belum terdapat realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan I dikarenakan proses pertanggungjawaban keuangan sedang berjalan dan baru terealisasi pada awal Triwulan II. Capaian pengawasan sumber daya perikanan sangat baik mengingat indeks tercapai 100 dengan keterbatasan anggaran.

Evaluasi dan analisis pada IKU11 dan IKU12 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 7 (Terselenggarannya Penanganan Pelanggaran administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan)** yaitu:

11) Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Triwulan I 2025		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU11	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81	65	81	120,00

Capaian indeks pengenaan sanksi administratif Pangkalan PSDKP Batam sebesar 120. Capaian ini merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penanganan sanksi administratif berdasarkan PERMEN-KP nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di bidang Kelautan dan

Perikanan. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama dengan keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose.

Pada triwulan I tahun 2025, Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan sejumlah 11 (sebelas) kasus diantaranya: 1 (satu) kasus di bidang Kelautan dan 10 (sepuluh) kasus di bidang Perikanan dengan rincian sebagai berikut.

NO	NAMA PERUSAHAAN	SANKSI	KETERANGAN
1	KM. Alviana Baru	SP 1	Pelanggaran daerah penangkapan ikan
2	KM. Karya Pertama	SP 1	Pelanggaran daerah penangkapan ikan
3	KM. Arto Moro	SP 1	Pelanggaran daerah penangkapan ikan
4	KM. Rahmat Jaya Abadi	SP 1	Pelanggaran daerah penangkapan ikan
5	KM. Rosalina Indah	SP 1	Pelanggaran daerah penangkapan ikan
6	KM. Heng Jaya	SP 1	Pelanggaran Pelabuhan pangkalan
7	KM. Hasil Karimun - III	SP 1	Pelanggaran Pelabuhan pangkalan
8	KM. Dolphin Jaya	SP 1	Pelanggaran Jalur Penangkapan Ikan
9	KM. Abadi Jaya II	SP 1	Pelanggaran Jalur Penangkapan Ikan
10	PT Batam Nara Indonesia	SP 1	Tidak Memenuhi Komitmen Perizinan Berusaha Berupa Sertifikat Standar Cara Berbudidaya Ikan Yang Baik (CBIB)
11	PT. Bumi Tanjung Batang	Rp. 33.273.169,-	1. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) 2. Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi

Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 untuk pengenaan sanksi administratif mendapat pagu sebesar Rp 300.800.000,- dan sampai triwulan I belum ada realisasi anggaran dikarenakan adanya revisi anggaran terkait efisiensi anggaran tahun 2025 berdasarkan intruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi dan masih proses pertanggungjawaban (SPJ). Target pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan tahun 2025 sebesar 10 kasus, namun pada triwulan I Tahun 2025 sudah terealisasi 11 kasus sehingga sangat baik capaian kinerjanya.

12) Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Triwulan I 2025		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU12	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	81	65	81	120,00

Capaian indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan sanksi administratif Pangkalan PSDKP Batam sebesar 81. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Tercapainya indikator ini dikarenakan sudah dilaksanakannya tindak lanjut terhadap 39 unit kapal perikanan Indonesia yang diindikasikan melakukan pelanggaran. Terhadap kapal yang lain dilakukan proses tindak lanjut pada triwulan II tahun 2025 dikarenakan sampai dengan berakhirnya triwulan I tahun 2025 kapal masih melakukan kegiatan penangkapan ikan dan belum Kembali ke Pelabuhan Pangkalan.

Pagu anggaran 2025 untuk pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan masuk dalam anggaran pengenaan sanksi administratif mendapat pagu sebesar Rp 300.800.000,- dan sampai triwulan I belum ada realisasi anggaran dikarenakan adanya revisi anggaran terkait efisiensi anggaran tahun 2025 berdasarkan intruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi dan masih proses pertanggungjawaban (SPJ). Target pengenaan pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan sebesar 10 kasus, namun pada triwulan I Tahun 2025 sudah terealisasi 39 kasus/unit kapal sehingga sangat baik capaian kinerjanya.

Evaluasi dan analisis pada IKU13 diuraikan sebagai **Sasaran Kegiatan 8 (Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan)** yaitu:

13) Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Triwulan I 2025		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU13	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	94	90	100	111,11

Capaian Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan sudah optimal pada triwulan I tahun 2025. Indikator ini merupakan perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengacu kepada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. Capaian ini membandingkan antara Jumlah kasus ditahun

berjalan yang telah selesai ditangani. Tercapaiannya indikator ini dikarenakan kasus di Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 telah menangani 1 (satu) kasus TPP, dan sudah inkrah pada bulan Februari 2025. Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 mendapat pagu anggaran pengenaan sanksi pidana sebesar Rp 116.375.000,- dan belum ada realisasi anggaran sampai dengan berakhirnya triwulan I dikarenakan adanya revisi anggaran terkait efisiensi anggaran tahun 2025 dan proses pertanggungjawaban.

Evaluasi dan analisis pada IKU14, IKU15, IKU16, IKU17, IKU18, IKU19, IKU20, IKU21, IKU22, IKU23, IKU24 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 09 (Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan)** yaitu:

(14) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Triwulan I 2025		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	71,5	-	-	-

Target nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 adalah 71,5 dan menjadi target tahunan. Target tahun 2025 adalah 1 laporan sehingga triwulan I tahun 2025 belum ada realisasi. Adapun anggaran tahun 2025 untuk kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Batam yaitu pelaksanaan pengelolaan keuangan sebesar Rp. 75.760.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 13.500.034,- atau 17.82%.

(15) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Triwulan I 2025		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	92	-	-	-

Target Nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pangkalan PSDKP Batam adalah 93,76 dan menjadi target tahunan. Target tahun 2025 adalah 1 laporan sehingga triwulan I tahun 2025 belum ada realisasi. Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran adalah proses evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada fitur Monev PA aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan. adapun indikatornya yaitu (1) Revisi DIPA, (2) Deviasi DIPA (3) Pengelolaan UP, (4) LPj Bendahara, (5) Data Kontrak, (6) Penyelesaian Tagihan, (7) Penyerapan Anggaran Tahun 2022 (8) Retur SP2D, (9) Perencanaan Kas, (10) Pengembalian SPM, (11) Dispensasi SPM dan (12) Pagu Minus. Adapun anggaran tahun 2025 untuk kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Batam yaitu pelaksanaan pengelolaan keuangan sebesar Rp. 75.760.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 13.500.034,- atau 17.82%.

16) Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Bat am

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Triwulan I 2025		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU16	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam	81	-	-	-

Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Batam tahun 2025 adalah 81 dan menjadi target tahunan. Nilai diperoleh dari komponen pembentuk yaitu (1) Kualifikasi yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP, (2) Kompetensi yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), (3) Kinerja yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP) dan (4) Disiplin yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin. Adapun anggaran tahun 2025 untuk Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Batam yaitu penatausahaan SDM dan jabatan fungsional sebesar Rp. 87.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.950.210,-. Pada tahun 2024, IP ASN Pangkalan PSDKP Batam 87,9 dan diharapkan pada tahun 2025 IP ASN pegawai Pangkalan PSDKP Batam bisa meningkat.

17) Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Triwulan I 2025		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU17	Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	86	-	-	-

Target Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Batam yaitu 86 dan menjadi target tahunan. SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Hasil penilaian oleh Inspektorat Mitra

berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB. Anggaran untuk pengelolaan kinerja organisasi pada tahun 2025 sebesar Rp. 14.400.000,- dan belum ada penyerapan karena terkena blokir karena efisiensi. Tahun 2024, nilai SAKIP Pangkalan PSDKP Batam adalah 85,2 dan diharapkan akan meningkat pada tahun 2025 ini.

18) Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Resiko Pangkalan PSDKP Batam (%)

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Triwulan I 2025		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU18	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Batam (%)	100	100	100	100

Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam mendapat target 100% dan tercapai 100%. Hal ini sama dengan capaian pada tahun 2024. Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Rencana pengendalian resiko Pangkalan PSDKP Batam Triwulan I tahun 2025 adalah 7 dan terealisasi 7 juga sehingga nilainya 100%. Tercapainya indikator ini dikarenakan telah dilakukan pengendalian mitigasi melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilakukan setiap triwulan pada pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko.

Pada Kegiatan Pengendalian internal Pemerintah Pangkalan PSDKP Batam TW I tahun 2025 telah menetapkan rencana pengendalian MR sebanyak 7 kegiatan yg sudah terealisasi di TW I sebanyak 7 Kegiatan. Adapun kegiatan sebagai berikut Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Target sebanyak 3 kegiatan dan realisasi sebanyak 3 kegiatan. Sarana dan prasarana target sebanyak 3 kegiatan dan terealisasi 3 kegiatan. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan ditargetkan pada Triwulan I tahun 2025 target 1 realisasi kegiatan 1 kegiatan. Adapun anggaran pengelolaan keuangan sebesar Rp. 75.760.000,- dan terealisasi Rp. 13.500.034,- atau 17,82%.

19) Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Triwulan I 2025		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU 19	Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95	95	100	105,28

Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan ditargetkan 95% dan tercapai 100%. Hal ini dikarenakan masih belum ada temuan dan tindak lanjut dari Itjen di Pangkalan PSDKP Batam pada triwulan I tahun 2025. Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat

Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Adapun anggaran tahun 2025 untuk Pelaksanaan pengelolaan keuangan sebesar Rp. 75.760.000,- dan terealisasi Rp. 13.500.034,- atau 17,82%.

20) Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Triwulan I 2025		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU20	Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam	88,5	88,5	83.91	94.31

Untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna SLO dilakukan survey pada setiap triwulannya. Kegiatan IKM bertujuan untuk mengukur pelayanan terhadap pengguna layanan SLO baik yang ada di UPT Pangkalan PSDKP Batam maupun Satuan Pengawas. Diharapkan terhadap kegiatan ini adalah adanya evaluasi untuk meningkatkan serta meminimalisir kekurangan pada pelayanan yang ada.

Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Pangkalan PSDKP Batam triwulan I tahun 2025 adalah 83,91 artinya masih dibawah target 88,5 sehingga capaian nilai kepuasan Masyarakat lingkup Pangkalan PSDKP Batam sebesar 94.31. Dengan nilai survey kepuasan Masyarakat sebesar 83,91 menandakan bahwa pelayanan di lingkup Pangkalan PSDKP Batam telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini dikarenakan pengawas perikanan serta petugas pelayanan telah mengikuti pelatihan Budaya Pelayanan Prima sehingga kualitas pelayanan dapat maksimal. Perolehan nilai kepuasan Masyarakat triwulan I tahun 2025 karena pelaku usaha dalam memberikan penilaian kurang sesuai sehingga tidak mempresentasikan pelayanan

yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dari Sebagian besar berpendapat pelayanan yang diberikan sudah baik, sehingga perlu memberikan pemahaman kepada pengguna layanan dalam memberikan penilaian. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menaikkan survey kepuasan Masyarakat adalah:

1. Meningkatkan pelayanan penerbitan SLO terhadap penerima layanan
2. Petugas/Pengawas perikanan menjelaskan maksud dan tujuan survey kepuasan Masyarakat terhadap penerima layanan sebelum memberikan penilaian
3. Petugas/Pengawas perikanan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dalam SKM sehingga pengguna layanan memberikan penilaian dengan objektif dan benar.

21) Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Triwulan I 2025		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU21	Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	80	-	-	-

Target Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 adalah 80 dan menjadi target tahunan. Pelaksanaan WBK nantinya akan berdasarkan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2025 pagu anggaran pelaksanaan reformasi birokrasi sebesar Rp. 98.314.000.- dan belum ada penyerapan karena terkena efisiensi dan hanya tersisa untuk kegiatan forum konsultasi public.

22) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Triwulan I 2025		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU22	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	80	-	-	-

Target Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP yaitu 80 dan menjadi target tahunan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; dan
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

Adapun anggaran tahun 2025 untuk Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan persuratan Ditjen PSDKP Rp. 30.876.000,- dan belum terealisasi karena semua anggaran diblokir efisiensi.

23) Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Triwulan I 2025		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU23	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Inovasi)	1	-	-	-

Target jumlah inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam adalah 1 inovasi dan menjadi target tahunan. Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatutan. Pada tahun 2025 pagu anggaran untuk implementasi inovasi pelayanan publik yang dihasilkan yaitu innovation Bootcamp dan Lomba Inovasi Tahun 2025 sebesar Rp. 28.800.000,- berupa jaldis namun belum ada realisasi karena lomba inovasi dilakukan akhir tahun 2025.

24) Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)

Indikator Kinerja Utama		Target 2025	Triwulan I 2025		
Kode	Uraian		Target	Capaian	%
IKU24	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70	-	-	-

Target Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 70 dan menjadi target tahunan. Tercapainya indikator ini karena terlaksananya serta pemenuhan dokumen dalam budaya kerja. Implementasi program-program budaya yaitu 5 menit sebelum jadwal, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, upayakan data terkini, organisasikan rapat, catat, aksi, arsipkan, tegakan aturan

dengan akuntabel dan transparan, belanjakan anggaran secara realistis, akuntabel dan Amanah, ASN PSDKP produktif kerja, menyelesaikan tugas dengan tepat, harga, motivasi dan inisiatif, gelorakan Gerakan hemat energi telah diterapkan di Pangkalan PSDKP Batam. Pada tahun 2025 pagu anggaran untuk implementasi program budaya kerja yang dihasilkan yaitu innovation Bootcamp dan Lomba Inovasi Tahun 2025 Rp. 28.800.000,- berupa jaldis namun belum ada realisasi karena lomba inovasi dilakukan akhir tahun 2025.

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk Penghitungan efisiensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2022 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pada Triwulan I tahun 2025 ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2025. Inpres ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan diberlakukannya inpres tersebut, maka anggaran Pangkalan PSDKP Batam mengalami efisiensi yaitu pemblokiran anggaran. Namun, efisiensi tersebut tidak merubah target kinerja organisasi sehingga pagu tetap seperti semula namun dilakukan pemblokiran. Awal pagu Pangkalan PSDKP Batam tahun 2025 adalah Rp. 39.350.325.000 menjadi Rp 21.973.228.000 tahun 2025 atau menjadi 55,84% dari pagu awal. Menindaklanjuti efisiensi anggaran tersebut banyak hal yang dilakukan di Pangkalan PSDKP Batam yaitu pembatasan penggunaan Listrik, jaldis yang selektif, dan penggunaan kendaraan dinas yang selektif juga. Selain itu, kegiatan pengawasan

yang menjadi *core* utama Pangkalan PSDKP Batam tetap terlaksana dan memenuhi ekspektasi atau rencana aksi yang sudah ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari nilai Indeks kinerja pemeriksaan pelaku usaha kelautan dan perikanan masing-masing 100% artinya dengan anggaran terkena efisiensi kegiatan pengawasan dapat dilakukan dengan baik dan sesuai target. Pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagian besar dilakukan pemeriksaan terhadap lebih dari satu pelaku usaha dalam satu surat perintah tugas (SPT) sehingga capaian output dapat mencapai target dengan penggunaan anggaran yang efektif.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam TA. 2025 sebesar Rp. 39.350.325.000,-. Pada triwulan I tahun 2025 realisasi anggaran sebesar Rp. 4.905.995.628,- atau 14,09%. Rincian realisasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Batam Triwulan I Tahun 2025

No	Kode	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi	
				(Rp)	%
Pengelolaan Kelautan dan Perikanan					
1	2350	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	14.684.931.000	172.825.200	8,46
2	2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	467.175.000	0	0
3	2352	Pemantauan dan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.041.537.000	11.060.900	0,54
4	2353	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	200.000.000	0	0
Dukungan Manajemen					
5	2355	Dukungan Manajemen internal Lingkup Ditjen PSDKP	21.956.682.000	4.722.109.528	22,34
TOTAL			39.350.325.000	4.905.995.628	12,47

BAB IV PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Batam triwulan I Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan capaian kegiatan Pangkalan PSDKP Batam yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IKM). Terhadap capaian IKU dan IK tersebut dilakukan analisis serta evaluasi sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Hasil capaian kinerja sasaran Pangkalan PSDKP Batam triwulan I tahun 2025 seluruhnya mencapai target yang diperjanjikan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **106,23** dengan predikat **BAIK**. Hal tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan seluruh kegiatan yang mencapai target dengan perencanaan kinerja dan anggaran yang baik serta pelaksanaan kegiatan dengan kemampuan sumber daya manusia yang memumpuni. Selain itu juga adanya koordinasi maupun pendampingan dari Eselon II lingkup Ditjen. PSDKP serta kerja sama dengan instansi terkait.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Pangkalan PSDKP Batam triwulan I tahun 2025, sebagai upaya peningkatan capaian kinerja pada periode selanjutnya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai berikut:

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1.	Memastikan kinerja Tim kerja prasarana, sarana dan operasi kapal pengawas sudah terlaksana Triwulan II tahun 2025	Koordinasi dengan bagian program mengenai anggaran 2350 yang diblokir dan jika ada buka blokir.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samuel Sandi Rundupadang
Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Batam

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Maret 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam

Semuel Sandi Rundupadang

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1 Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	82
2	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	2 Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		3 Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92
3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	4 Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		5 Persentase prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		6 Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100
4	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	7 Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
		8 Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75
5	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	9 Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
6	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	10 Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81
		12 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	13 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94
9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	14 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	71,5
		15 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	92

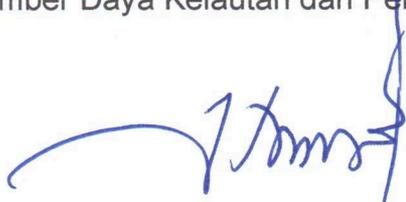
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	16 Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Batam (Indeks)	81
	17 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	86
	18 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Pangkalan PSDKP Batam (%)	100
	19 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95
	20 Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	88,5
	21 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	80
	22 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pangkalan PSDKP Batam (Nilai)	80
	23 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Batam (Inovasi)	1
	24 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	14.684.931.000
	b. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	467.175.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.041.537.000
	d. Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	200.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	21.956.682.000
Total Anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2025		39.350.325.000

Jakarta, 19 Maret 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam



Semuel Sandi Rundupadang